

PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Djodi Setiawan

e-mail : djodisetiawan13071@gmail.com

Syifa Vidya Sofwan

e-mail : vidyasofwan@yahoo.com

Mellinia Savitri

e-mail : melliniasavitri5@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal kabupaten bandung periode 2011-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan data berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung tahun 2011-2020.

Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dana bagi hasil terhadap belanja modal ini dibuktikan dengan hasil uji $t_{hitung} < t_{tabel}$. Dan hasil uji F menunjukkan hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$. Pengaruh yang sangat kuat dapat ditunjukkan pada nilai koefisien determinasi sebesar 0,846 (84,6%) yang berarti, Belanja Modal Kabupaten Bandung Pada Periode 2011-2020 dipengaruhi oleh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil sebesar 84,6%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan pajak daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten bandung.

Kata Kunci : Pendapatan pajak daerah, dana bagi hasil dan Belanja modal

I. PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya era Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi di berbagai bidang, terutama di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama dalam terbentuk *good governance*. Akuntabilitas diperlukan agar pengelola keuangan dapat memberikan laporan dan pertanggungjawabannya atas kinerjanya kepada mereka yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah perlu menyusun anggaran sebagai pedoman dalam menjalankan segala aktivitasnya. Anggaran dalam pemerintah daerah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Darise APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang

Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Djodi Setiawan, Syifa Vidya Sofwan, Mellinia Savitri

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Menurut Iwan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya Rp. 2,53 triliun dari Rp. 3,26 triliun yang dianggarkan. Juga realisasi belanja transfer atau dana perimbangan ke kabupaten/kota yang masih rendah sebesar Rp. 13,39 triliun dari anggaran Rp. 14,38 triliun. "Rendahnya realisasi belanja modal maupun transfer ke kabupaten/kota membuat pembangunan di daerah khususnya pembangunan maupun infrastruktur publik yang penting menjadi terganggu seperti jalan dan jembatan," ujarnya. Iwan menambahkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 masih belum menunjukkan sisi keterkaitan dengan capaian visi-misi Gubernur yang ingin menjadikan Jawa Barat Juara Lahir dan Batin. Laporan pertanggungjawaban masih mengandung program kegiatan yang bersifat rutinitas yang terus berulang dan tidak memiliki dampak signifikan bagi capaian kemajuan Jawa Barat. Berdasarkan hal di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung".

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pendapatan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo, Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2 Pengertian Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, Dana Bagi Hasil merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil tersebut dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 19 ayat (1), DBH terdiri atas Pajak dan Sumber Daya Alam. Sumber-sumber penerimaan DBH adalah Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan pasal 25/29 dan 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN). Sementara DBH yang bersumber dari Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

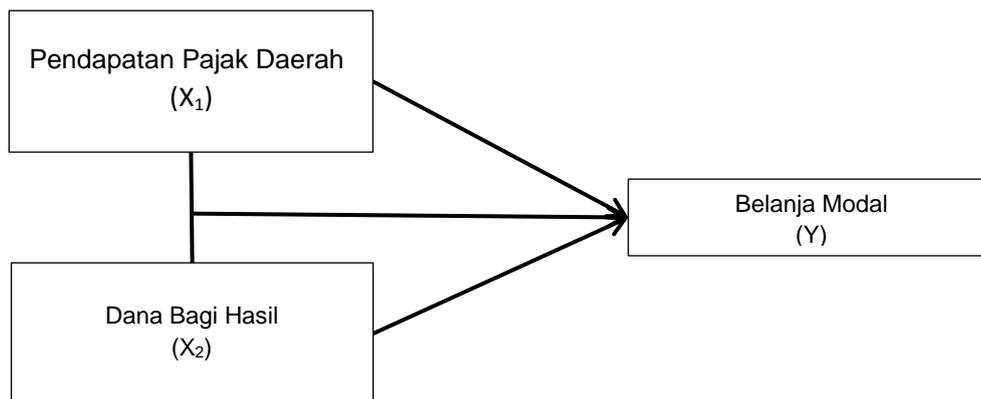
2.1.3 Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Sedangkan menurut Darise Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Bagan Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangkaan pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
3. Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (Y), Pendapatan Pajak Daerah (X_1), Dana Bagi Hasil (X_2)

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis penelitian survey dengan tingkat eksplanasi adalah deskriptif. Metode penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan mengamati laporan

Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Djodi Setiawan, Syifa Vidya Sofwan, Mellinia Savitri

keuangan sebagai alat pengumpulan data. Data yang digunakan menekankan pada data-data numeric (angka). Setelah data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif pada akhir penelitian.

3.2.1 Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

3.2.1.2 Sampel

Sampel menurut Sugiyono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua populasi yaitu laporan realisasi anggaran sejak berdirinya pemerintahan sampai dengan sekarang dijadikan sampel. Oleh karena itu, sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran periode 2011 sampai dengan 2020 atau selama 10 tahun.

3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linear regresi berganda digunakan peneliti, bila peneliti ingin mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono mengemukakan bahwa analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Analisis korelasi Koefisien digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (Independent Variable) terhadap variabel terikat (Dependent Variable), digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono adalah sebagai berikut :

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono "Statistika Untuk Penelitian" (2017:231)

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber: Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23" (2013:98)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

4. Pengujian Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

a. Uji Hipotesis t (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Setelah menghitung t_{hitung} selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang dibandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} dengan ketentuan uji sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- 2) Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- 3) Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

b. Uji Hipotesis F (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Untuk mengetahui apakah variabel independen keseluruhan mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikan tertentu.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).

Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Djodi Setiawan, Syifa Vidya Sofwan, Mellinia Savitri

3) Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

c. Menentukan Taraf Sigifikansi

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.1
Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-72.406	115.217		-.628	.550
	X1	1.055	.396	.569	2.663	.032
	X2	1.063	.538	.422	1.975	.089

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = -72,406 + 1,055 X_1 + 1,063 X_2$$

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -72,406
Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2) nilainya 0, maka Belanja Modal (Y) adalah -72,406
2. Koefisien regresi Pendapatan Pajak Daerah (X_1) sebesar 1,055.
Koefisien regresi (b_1) tersebut hasilnya Positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Pendapatan Pajak Daerah (X_1) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Belanja Modal (Y) sebesar 1,055 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Dana Bagi Hasil (X_2) sebesar 1,063.
Koefisien regresi (b_2) tersebut hasilnya Positif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Dana Bagi Hasil (X_2) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Belanja Modal (Y) sebesar 1,063 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.1.2 Analisis Korelasi

Tabel 4.2
Hasil Analisis Korelasi Pearson
Correlations

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.720*	.872**
	Sig. (2-tailed)		.019	.001
	N	10	10	10
X2	Pearson Correlation	.720*	1	.831**
	Sig. (2-tailed)	.019		.003
	N	10	10	10
Y	Pearson Correlation	.872**	.831**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	
	N	10	10	10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan Data dengan SPSS Versi 20

Tabel 4.3
Hasil Analisis Korelasi Ganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.920 ^a	.846	.802	106.49206	2.120

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Versi 20

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa:

1. Korelasi antara Pendapatan Pajak Daerah dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,872. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Dana Perimbangan akan diikuti oleh kenaikan Belanja Modal.
2. Korelasi antara Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal adalah sebesar 0,831. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Dana Bagi Hasil akan diikuti oleh kenaikan Belanja Modal.

4.1.3 Uji Signifikan Parsial (Uji t) dan Uji Signifikan Simultan (Uji t)

4.1.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).

1. Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel bebas pendapatan pajak daerah (X_1) adalah sebesar 2,663 dengan signifikansi 0,032 sedangkan t_{tabel} dengan dk 10 ($n-3 = 10-3$) adalah 2,365 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih

Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung | Djodi Setiawan, Syifa Vidya Sofwan, Mellinia Savitri

besar daripada t_{tabel} ($2,663 > 2,365$) dan taraf signifikansi X_1 ($0,032$) lebih kecil daripada $0,05$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel bebas Dana Bagi Hasil (X_2) adalah sebesar $1,975$ dengan signifikansi $0,089$ sedangkan t_{tabel} dengan dk 10 ($n-3 = 10-3$) adalah $2,365$ dan taraf signifikansi $0,05$. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($1,975 < 2,365$) dan taraf signifikansi X_2 ($0,089$) lebih besar daripada $0,05$ maka H_0 diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

4.1.3.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 5
Hasil Perhitungan Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	436951.599	2	218475.799	19.265	.001 ^b
	Residual	79383.909	7	11340.558		
	Total	516335.508	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah $19,265$ sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 7 dan regresi 2 dengan taraf signifikan $0,001$ sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar $4,737$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kedua variabel dependen yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Dari tabel ANOVAa diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji F sebesar $0,001$ lebih kecil dari $0,05$ maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung periode 2011-2020

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa pendapatan pajak daerah dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi (b_1) sebesar $1,055$ dan hasilnya positif, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel pendapatan pajak daerah (X_1) naik 1% ($0,01$) maka akan menyebabkan kenaikan belanja modal sebesar $1,055$ dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian hasil koefisien korelasi parsial

sebesar 0,598 berada pada nilai korelasi antara 0,40-0,599 mempunyai hubungan yang sedang, karena nilainya positif maka setiap kenaikan pendapatan pajak daerah akan diikuti oleh kenaikan belanja modal dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sebesar 49,6% memiliki pengaruh yang sedang. Hasil uji t bahwa pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal berpengaruh signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,663 > 2,365$) dengan nilai sig $< 0,05$ yaitu 0,01 pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pendapatan pajak daerah (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

Pendapatan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, seperti terlihat pada hasil analisis deskriptif bahwa pendapatan pajak daerah Kabupaten Bandung selama 10 periode mengalami ketidakstabilan yang cenderung meningkat dikarenakan masih adanya masyarakat kabupaten Bandung yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisma dengan judul pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada luas wilayah sebagai variabel moderating di provinsi banten yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Adapun juga penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainin Nissa dengan judul penelitian Pengaruh pendapatan asli daerah, pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal di karesidenan Surakarta tahun 2013-2017 yang menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung periode 2011-2020

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa dana bagi hasil dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi sebesar 1,063 yang artinya bahwa setiap kenaikan perputaran piutang sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan belanja modal sebesar 1,063 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar 0,709 berada pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat, karena nilainya positif maka setiap kenaikan dana bagi hasil akan diikuti oleh kenaikan belanja modal dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung sebesar 35% memiliki pengaruh yang kuat. Hasil uji t bahwa dana bagi hasil terhadap belanja modal memiliki pengaruh yang tidak signifikan karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,975 < 2,365$), serta nilai sig. diatas 0,05 yaitu sebesar 0,089 pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penerimaan H_0 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa dana bagi hasil (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y).

Dana bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, seperti terlihat pada hasil analisis deskriptif bahwa dana bagi hasil pada 10 periode mengalami ketidakstabilan yang cenderung meningkat. Dikarenakan pemerintah kabupaten bandung mampu menutupi belanja modal oleh beberapa faktor seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan lain-lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Cahaning dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015 yang memuat variabel independen (Dana Bagi Hasil) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negative tidak signifikan terhadap belanja modal. Adapun juga hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati A. Rifai dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi

Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Djodi Setiawan, Syifa Vidya Sofwan, Mellinia Savitri

umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sulawesi tengah yang menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung periode 2011-2020

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel perputaran total aset dan perputaran piutang secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi ganda sebesar 0,920 berada pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif. Kemudian hasil penghitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 84,6% memiliki pengaruh yang sangat kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon (ϵ) sebesar 15,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan pajak daerah dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bandung karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($19,265 > 6,94$) dengan nilai sig, $0,001 < 0,05$ dan pada gambar kurva uji fihak kanan bahwa F_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pengaruh yang signifikan Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, bahwa secara bersama-sama dipengaruhi oleh Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil, sehingga Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap Belanja Modal walaupun secara sendiri-sendiri menunjukkan hasil bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif, kuat dan tidak signifikan, dan Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh positif, sedang dan signifikan. Artinya kedua variabel ini apabila bersama-sama akan memberikan kontribusi yang positif, sangat kuat dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Putri Handayani, Syukriy Abdullah, Heru Fahlevi dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, dan memperoleh hasil bahwa Pendapatan Pajak Daerah (X_1) dan Dana Bagi Hasil (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y) baik secara parsial maupun simultan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pemaparan yang telah peneliti bahas sebelumnya, maka peneliti mendapatkan simpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis uji pengaruh parsial antara Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal menunjukkan variabel Pendapatan Pajak Daerah mempunyai hubungan positif yang sedang dan signifikan, hal ini berarti Pendapatan Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung periode 2011-2020. Kabupaten Bandung mampu memanfaatkan sumber - sumber dari Pendapatan Pajak Daerah dengan baik sehingga setiap tahunnya dalam periode 2011 sampai dengan 2020 Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan, peningkatan dari pendapatan pajak daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung mampu menunjukkan kemandirian dan menjawab tantangan sistem otonomi daerah yang mengharuskan setiap daerah untuk mencari dan memanfaatkan sumber – sumber pendapatan yang berada dalam daerahnya

- sendiri, hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung sudah baik
2. Variabel dana bagi hasil mempunyai hubungan tidak searah yang lemah dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kabupaten Bandung periode 2011-2020 hal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji parsial variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan Belanja Modal.
 3. Secara simultan, variabel bebas Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal yang merupakan variabel terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainin Nissa, "Pengaruh pendapatan asli daerah, pajak daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal di karesidenan Surakarta tahun 2013-2017" (2020).
- Arisma. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Banten" (2020).
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jakarta: Selemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi.
- Marihot P, Siahaan. 2010. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- N, Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Index.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55. Tentang Dana Perimbangan, 2005.
- Rachmawati A. Rifai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah" (2017)
- Raharjo, Budi. 2009. Laporan Keuangan Perusahaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Sri Cahaning. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015" (2018).
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007.
- Undang-Undang Nomor 33. Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, 2004.